



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
DESA SUKOWIDI

Jalan Sekolahan No. 01 Kode Pos 63394
Email : Sukowididesa@gmail.com. Telp.-

SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIPAKAI
UNTUK SDN SUKOWIDI 3

Nomor : 140 /270/403.415.5/2025

Kami Kepala Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, menerangkan bahwa :

1. Tanah yang dipakai untuk SDN Sukowidi 3 adalah tanah milik pemerintah Desa Sukowidi, yang sudah bersertifikat No Hak Pakai : 00025 dengan Luas : 2000 M²
2. Tanah tersebut diatas untuk dipakai SDN Sukowidi 3 mulai tahun 1983 hingga sekarang

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk menjadikan maklum adanya

Sukowidi, 03 Juni 2025
Kepala Desa Sukowidi


TARMUJI, S.Sos

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : ~~SEWA~~ 7 No 00025
PAKAI

PROPINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN / KOTAMADYA : MAGETAN
KECAMATAN : KARTOHARJO
DESA / KELURAHAN : SUKOWIDI

DAFTAR ISIAN 307

No. 4216 / 2006

DAFTAR ISIAN 208

No. 2353 / 2006

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

MAGETAN

1 2 • 2 2 • 1 4 • 0 5 • 2 • 0 0 0 2 5

a) HAK : Pakai No. : 00035 Desa / Kel. : Sukowidi Tgl. berakhirnya hak : -	D) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH DESA SUKOWIDI = <u>Tanggal lahir / akta pendirian</u>
b) NIB 12.22.14.05.00586 Letak Tanah Desa Sukowidi	
c) ASAL HAK 1. <u>Konversi</u> 2. <u>Pemberian hak Pakai</u> - - - - - 3. <u>Pemecahan / Pemisahan /</u> <u>Penggabungan bidang</u>	g) PEMBUKUAN <u>Magetan</u> Tgl. 24 MAY 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <u>Kotamadya</u> <u>Magetan</u> ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. <u>Daftar Isian 202</u> Tgl. - No. - 2. <u>Surat Keputusan KAKANTAH KAB.</u> <u>MAGETAN</u> Tgl. 23-01-2006 No. 52.530.1.35.22-2006 3. <u>Permohonan Pemecahan /</u> <u>Pemisahan / Penggabungan bidang</u> Tgl. - No. -	 <u>R. SLAMET SANTOSO, SH.</u> NIP NIP. 010096109 h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Magetan</u> Tgl. 24 MAY 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <u>Kotamadya</u> <u>Magetan</u>
e) SURAT UKUR Tgl. 20 September 2005 No. 453/Sukowidi/2005 Luas. 2000 M2	  <u>R. SLAMET SANTOSO, SH.</u> NIP NIP. 010096109
i) PENUNJUK - DI 301 II no.361/2006 tgl.05-04-2006. - Berasal dari Tanah Negara bekas Hak Milik Adat C.Desa no.615 ps.82SIV. - Peta situasi Desa Sukowidi, lembar 2 kotak F/3. - Dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri III Sukowidi. - Tanpa Ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang Hak Atas Tanah ini tidak boleh diubah penggunaannya dan dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain. - Sebidang tanah pertanian.	

1 2 • 2 2 • 1 4 • 0 5 • 2 • 0 0 0 2 5

NIB : 12.22.14.05.00586

SURAT UKUR

Nomor : 453 / Sukowidi / 200.....5

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Magetan

Kecamatan : Kartoharjo

Desa / Kelurahan : Sukowidi

Peta : Peta Situasi Desa Sukowidi Nomor Peta Pendaftaran :

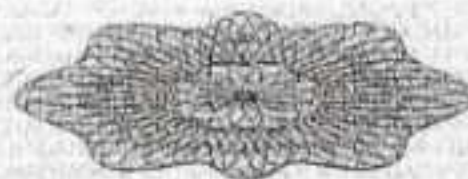
Lembar : 2 Kotak : F/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

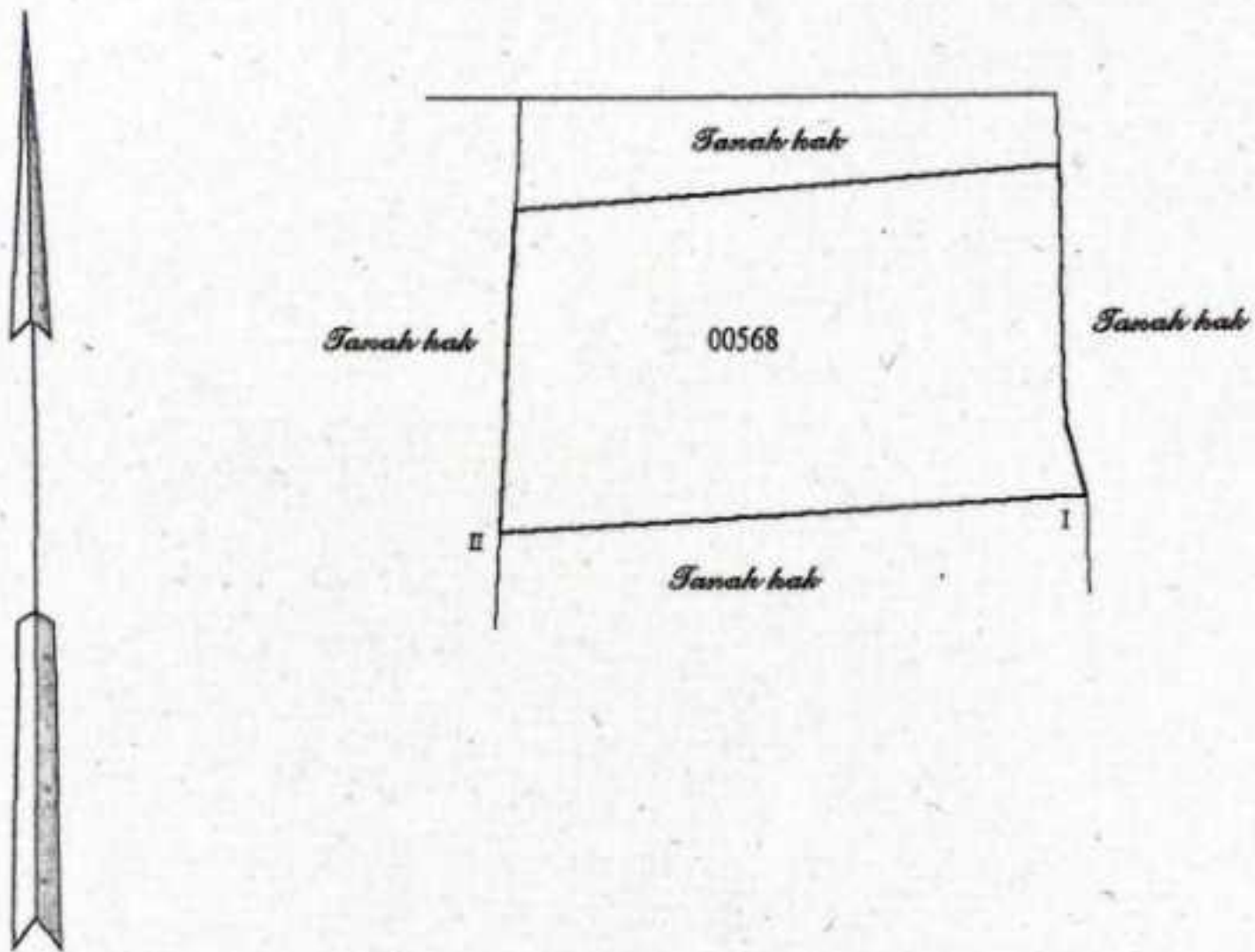
Tanda-tanda batas : Tugu beton I dan II memenuhi Permeneg Agraria Kepala BPN No: 3/1997 pasal 22 ayat (1) huruf e.

Luas : 2000 m² (Dua ribu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh : Kusno
dan ditetapkan oleh petugas ukur : Suryo Siswanto



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Tanah ini berasal dari hak bekas yasan

Petok No : 615 Persil No : 82 / S/TV

Daftar Isian 302 tgl. 4 Agustus 2005 No. 1843

Daftar Isian 307 tgl. 20 SEP 2005 No. 7538

UNTUK SERTIPIKAT

Magetan

Tgl. 20 SEP 2005 200.

Magetan

Tgl **24 MAY 2006** 200.

AN. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

Magetan

Magetan

ttd.

R. SLAMET SANTOSO, SH

SUMARDI

NIP

010 096 109

NIP

010 074 259

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :

Pengganti

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

NOMENKLATUR SEKDA



BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN

PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

KABUPATEN MAGETAN



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
7. Urusan Tata Usaha adalah unsur staf/pelaksana yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non formal.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. UPTD Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD); dan
 - c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - (5) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Satuan

Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan non struktural.
 - (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan non struktural.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja sekolah;

- b. mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses, dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling (BK) sebagai pembina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggaraan administrasi sekolah yaitu meliputi administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, sarana prasarana dan kurikulum;
- e. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan/atau masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan pendidikan non formal;
 - b. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. melaksanakan administrasi pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - d. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Urusan Tata Usaha UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional Satuan Pendidikan Formal terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari Pamong Belajar dan Jabatan fungsional lainnya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 42 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN

- I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), TERDIRI DARI :
 1. TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MAGETAN
 2. TK NEGERI UNGGULAN KECAMATAN MAGETAN
 3. TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TAKERAN
 4. TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KAWEDANAN
 5. TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MAOSPATI

- II. UNIT PELAKSANA TEKKIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR (SD), TERDIRI DARI :
 1. SDN MAGETAN 1
 2. SDN MAGETAN 2
 3. SDN MAGETAN 3
 4. SDN MAGETAN 4
 5. SDN BULUKERTO 2
 6. SDN TAMBRAN 1
 7. SDN SELOSARI 1
 8. SDN SELOSARI 2
 9. SDN SELOSARI 3
 10. SDN SELOSARI 4
 11. SDN RINGINAGUNG 1
 12. SDN RINGINAGUNG 2
 13. SDN CANDIREJO 1
 14. SDN KEPOLOREJO 1
 15. SDN KEPOLOREJO 2
 16. SDN SUKOWINANGUN 1
 17. SDN SUKOWINANGUN 2
 18. SDN SUKOWINANGUN 3
 19. SDN SUKOWINANGUN 4
 20. SDN TAWANGANOM 1
 21. SDN TAWANGANOM 2
 22. SDN KEBONAGUNG
 23. SDN PURWOSARI 1
 24. SDN PURWOSARI 2
 25. SDN BARON 1 MAGETAN
 26. SDN BARON 2 MAGETAN
 27. SDN TAMBAKREJO
 28. SDN MANGKUJAYAN
 29. SDN UNGGULAN MAGETAN
 30. SDN TAPAK 1
 31. SDN TAPAK 2
 32. SDN SUMBERDODOL 1
 33. SDN SUMBERDODOL 2
 34. SDN SUKOWIDI 1
 35. SDN SUKOWIDI 2

36. SDN NGILIRAN 1
37. SDN NGILIRAN 2
38. SDN BEDAGUNG 1
39. SDN BEDAGUNG 2
40. SDN BEDAGUNG 3
41. SDN JABUNG 1
42. SDN JABUNG 2
43. SDN JABUNG 3
44. SDN PANEKAN 1
45. SDN PANEKAN 2
46. SDN PANEKAN 3
47. SDN MANJUNG 1
48. SDN MANJUNG 2
49. SDN REJOMULYO
50. SDN TURI 1
51. SDN TURI 2
52. SDN TURI 3
53. SDN BANJAREJO 1
54. SDN BANJAREJO 2
55. SDN BANJAREJO 3
56. SDN MILANGASRI 1
57. SDN MILANGASRI 2
58. SDN MILANGASRI 3
59. SDN WATES 1
60. SDN WATES 2
61. SDN SIDOWAYAH 1
62. SDN SIDOWAYAH 2
63. SDN SIDOWAYAH 3
64. SDN CEPOKO 1
65. SDN CEPOKO 2
66. SDN TERUNG
67. SDN TANJUNGSARI
68. SDN DADI 1
69. SDN DADI 2
70. SDN DADI 3
71. SDN DADI 4
72. SDN PUNTUKDORO 2
73. SDN NGANCAR 1
74. SDN NGANCAR 2
75. SDN SARANGAN 1
76. SDN SARANGAN 2
77. SDN SARANGAN 3
78. SDN PLAOSAN 1
79. SDN PLAOSAN 2
80. SDN PLAOSAN 3
81. SDN PLAOSAN 4
82. SDN PLAOSAN 5
83. SDN BULUHARJO 1
84. SDN BULUHARJO 2
85. SDN BULUHARJO 3
86. SDN BULUGUNUNG 1
87. SDN BULUGUNUNG 3
88. SDN BULUGUNUNG 4
89. SDN SIDOMUKTI 1
90. SDN PUNTUKDORO 1
91. SDN PUNTUKDORO 3

92. SDN PUNTUKDORO 4
93. SDN PLUMPUNG 1
94. SDN PLUMPUNG 2
95. SDN SUMBERAGUNG 1
96. SDN SUMBERAGUNG 2
97. SDN BOGOARUM 1
98. SDN BOGOARUM 2
99. SDN SIDOMUKTI 2
100. SDN NITIKAN
101. SDN RANDUGEDE 1
102. SDN RANDUGEDE 2
103. SDN PACALAN 1
104. SDN PACALAN 2
105. SDN PACALAN 3
106. SDN SENDANGAGUNG 1
107. SDN SENDANGAGUNG 2
108. SDN PONCOL 2
109. SDN PONCOL 1
110. SDN PONCOL 3
111. SDN PONCOL 4
112. SDN GONGGANG 1
113. SDN GONGGANG 2
114. SDN GONGGANG 3
115. SDN GONGGANG 4
116. SDN GENILANGIT 1
117. SDN PONCOL 5
118. SDN JANGGAN
119. SDN GENILANGIT 2
120. SDN ALASTUWO 1
121. SDN ALASTUWO 2
122. SDN ALASTUWO 3
123. SDN CILENG 3
124. SDN CILENG 2
125. SDN CILENG 1
126. SDN SOMBO 1
127. SDN SOMBO 2
128. SDN PLANGKRONGAN 1
129. SDN PLANGKRONGAN 2
130. SDN PLANGKRONGAN 3
131. SDN PLANGKRONGAN 4
132. SDN SAYUTAN 1
133. SDN SAYUTAN 2
134. SDN SAYUTAN 4
135. SDN SAYUTAN 5
136. SDN TROSONO 1
137. SDN MATEGAL 1
138. SDN MATEGAL 2
139. SDN MATEGAL 4
140. SDN NGLOPANG 1
141. SDN NGLOPANG 2
142. SDN BUNGKUK
143. SDN PARANG 1
144. SDN PARANG 4
145. SDN TROSONO 2
146. SDN TROSONO 3
147. SDN NGUNUT 1

148 SDN NGUNUT 2
149 SDN PARANG 3
150 SDN PARANG 5
151 SDN NGAGLIK 1
152 SDN NGAGLIK 2
153 SDN NGAGLIK 3
154 SDN NGAGLIK 4
155 SDN TAMANARUM 1
156 SDN TAMANARUM 3
157 SDN PRAGAK 1
158 SDN PRAGAK 2
159 SDN PRAGAK 3
160 SDN PRAGAK 4
161 SDN KRAJAN 1
162 SDN KRAJAN 2
163 SDN KRAJAN 3
164 SDN SUNDUL 1
165 SDN SUNDUL 2
166 SDN JOKETRO 1
167 SDN JOKETRO 3
168 SDN MALANG
169 SDN GULUN 1
170 SDN GULUN 2
171 SDN GULUN 3
172 SDN TANJUNGSEPREH 2
173 SDN SUGIHWARAS 1
174 SDN SUGIHWARAS 3
175 SDN MAOSPATI 3
176 SDN SUGIHWARAS 2
177 SDN SEMPOL 2
178 SDN MAOSPATI 1
179 SDN MAOSPATI 2
180 SDN MAOSPATI 6
181 SDN KRATON 1
182 SDN MRANGGEN 1
183 SDN MRANGGEN 2
184 SDN KRATON 4
185 SDN KRATON 6
186 SDN SURATMAJAN 1
187 SDN SURATMAJAN 2
188 SDN KRATON 2
189 SDN NGUJUNG 1
190 SDN NGUJUNG 2
191 SDN PANDEYAN 1
192 SDN PANDEYAN 2
193 SDN GAMBIRAN 1
194 SDN GAMBIRAN 2
195 SDN RONOWIJAYAN
196 SDN PESU 1
197 SDN PESU 2
198 SDN SUMBEREJO 1
199 SDN SUMBEREJO 2
200 SDN KAUMAN 1
201 SDN BALUK
202 SDN MARON
203 SDN KAUMAN 2

204 SDN PATHAN
205 SDN GRABAHAN
206 SDN MANTREN 1
207 SDN KARANGREJO 1
208 SDN MANTREN 2
209 SDN GONDANG
210 SDN SAMBIREMHE
211 SDN PELEM 1
212 SDN MANISREJO 1
213 SDN MANISREJO 2
214 SDN PELEM 2
215 SDN GEBYOG 1
216 SDN GEBYOG 2
217 SDN PRAMPELAN
218 SDN KARANGSONO
219 SDN BANJAREJO
220 SDN PURWODADI
221 SDN MANGGE 2
222 SDN TEBON 1
223 SDN TEBON 2
224 SDN BOGOREJO 1
225 SDN BOGOREJO 2
226 SDN BANGUNASRI
227 SDN NGUMPUL
228 SDN BLARAN 1
229 SDN BLARAN 2
230 SDN JONGGRANG 1
231 SDN JONGGRANG 2
232 SDN REJOMULYO
233 SDN MANGGE 3
234 SDN MANJUNG
235 SDN KLAGEN 1
236 SDN KLAGEN 3
237 SDN KLAGEN 4
238 SDN PANGGUNG 1
239 SDN PANGGUNG 2
240 SDN TEMENGGUNGAN 1
241 SDN TEMENGGUNGAN 2
242 SDN JUNGKE
243 SDN TEMBORO 1
244 SDN TEMBORO 2
245 SDN SOBONTORO 1
246 SDN SOBONTORO 2
247 SDN GEPLAK
248 SDN SUMURSONGO 1
249 SDN SUMURSONGO 2
250 SDN KARAS 1
251 SDN KARAS 2
252 SDN KARAS 3
253 SDN KUWON 1
254 SDN KUWON 2
255 SDN BOTOK 2
256 SDN TAJI 1
257 SDN TAJI 2
258 SDN GINUK 1
259 SDN GINUK 2

260 SDN MRAHU
261 SDN JERUK 1
262 SDN BAYEMTAMAN
263 SDN BAYEMWETAN
264 SDN GUNUNGAN 1
265 SDN GUNUNGAN 2
266 SDN KARANGMOJO 1
267 SDN KARANGMOJO 2
268 SDN JERUK 2
269 SDN KLURAHAN
270 SDN KARTOHARJO 1
271 SDN PENCOL
272 SDN JAJAR 1
273 SDN JAJAR 2
274 SDN KARTOHARJO 2
275 SDN NGELANG 1
276 SDN NGELANG 2
277 SDN SUKOWIDI 1
278 SDN SUKOWIDI 2
279 SDN SUKOWIDI 3
280 SDN BULU 1
281 SDN BULU 2
282 SDN BANDAR 1
283 SDN BANDAR 2
284 SDN SUKOMORO 1
285 SDN SUKOMORO 2
286 SDN KEDUNGGUWO
287 SDN BIBIS
288 SDN TAMBAKMAS 1
289 SDN TAMBAKMAS 2
290 SDN TAMANAN 1
291 SDN TAMANAN 2
292 SDN KALANGKETI
293 SDN TINAP 1
294 SDN TINAP 2
295 SDN TINAP 3
296 SDN KEMBANGAN 1
297 SDN KEMBANGAN 2
298 SDN KEMBANGAN 3
299 SDN POJOKSARI 1
300 SDN POJOKSARI 2
301 SDN POJOKSARI 3
302 SDN KENTANGAN 1
303 SDN KENTANGAN 2
304 SDN BOGEM 1
305 SDN TRUNENG
306 SDN SELOREJO 1
307 SDN SELOREJO 2
308 SDN SUGIHREJO 1
309 SDN SUGIHREJO 2
310 SDN JAMBANGAN
311 SDN NGADIREJO
312 SDN KAWEDANAN 2
313 SDN BOGEM 1
314 SDN BOGEM 2
315 SDN REJOSARI

316 SDN TULUNG 1
317 SDN GENENGAN 2
318 SDN GENENGAN 1
319 SDN KARANGREJO 1
320 SDN KARANGREJO 2
321 SDN MOJOREJO 1
322 SDN MOJOREJO 2
323 SDN NGUNUT
324 SDN KAWEDANAN 3
325 SDN TULUNG 2
326 SDN POJOK
327 SDN TLADAN 1
328 SDN TLADAN 2
329 SDN GARON
330 SDN SAMPUNG
331 SDN MANGUNREJO
332 SDN BALEREJO
333 SDN NGENTEP
334 SDN GIRIPURNO
335 SDN KEPUHREJO 1
336 SDN KEPUHREJO 2
337 SDN KEPUHREJO 3
338 SDN KUWONHARJO 1
339 SDN KUWONHARJO 2
340 SDN KUWONHARJO 3
341 SDN KERIK 1
342 SDN KERIK 2
343 SDN WADUK 1
344 SDN WADUK 2
345 SDN JOMBLANG 1
346 SDN JOMBLANG 2
347 SDN SAWOJAJAR 1
348 SDN SAWOJAJAR 2
349 SDN TAKERAN
350 SDN KIRINGAN 1
351 SDN KIRINGAN 2
352 SDN TAWANGREJO 1
353 SDN TAWANGREJO 2
354 SDN TAWANGREJO 3
355 SDN DUYUNG 1
356 SDN DUYUNG 2
357 SDN KERANG 1
358 SDN KERANG 2
359 SDN MADIGONDO
360 SDN KROWE 1
361 SDN KROWE 3
362 SDN KROWE 4
363 SDN KROWE 5
364 SDN LEMBAYAN KULON 2
365 SDN KEDIREN 1
366 SDN KEDIREN 2
367 SDN KEDIREN 3
368 SDN TAPEN 1
369 SDN TAPEN 2
370 SDN LEMBAYAN KULON 1
371 SDN LEMBAYAN WETAN 1

372 SDN LEMBAYAN WETAN 2
 373 SDN LEMBAYAN WETAN 3
 374 SDN LEMBAYAN WETAN 4
 375 SDN LEMBAYAN KULON 3
 376 SDN PUPUS 1
 377 SDN PUPUS 2
 378 SDN PUPUS 3
 379 SDN PUPUS 4
 380 SDN PUPUS 5
 381 SDN KEDUNG PANJI 1
 382 SDN KEDUNG PANJI 2
 383 SDN NGURI 1
 384 SDN NGURI 2
 385 SDN NGURI 3
 386 SDN NGURI 4
 387 SDN TUNGGUR 2
 388 SDN TUNGGUR 1
 389 SDN DUKUH 1
 390 SDN KEDUNG PANJI 3
 391 SDN BENDO 2
 392 SDN LEMAHBANG
 393 SDN KLECO
 394 SDN SETREN 1
 395 SDN SETREN 2
 396 SDN SETREN 3
 397 SDN BENDO 1
 398 SDN CARIKAN
 399 SDN KLEDOKAN 1
 400 SDN KLEDOKAN 2
 401 SDN DUWET 1
 402 SDN DUWET 2
 403 SDN DUWET 3
 404 SDN BELOTAN 1
 405 SDN BELOTAN 3
 406 SDN DUKUH 1
 407 SDN DUKUH 2
 408 SDN BULUGLEDEG
 409 SDN BELOTAN 2
 410 SDN PINGKUK 2
 411 SDN PINGKUK 4
 412 SDN PINGKUK 5
 413 SDN TANJUNG 2
 414 SDN SOCO 1
 415 SDN SOCO 2
 416 SDN KINANDANG 1
 417 SDN KINANDANG 2
 418 SDN KINANDANG 3
 419 SDN TANJUNG 3
 420 SDN BULAK 1
 421 SDN TEGALARUM 1
 422 SDN SUMBERDUKUN
 423 SDN SELOPANGGUNG
 424 SDN BALEASRI 1
 425 SDN BALEASRI 2
 426 SDN BANGSRI 1
 427 SDN BANGSRI 2

428 SDN BALEGONDO 1
429 SDN BALEGONDO 3
430 SDN SELOTINATAH 3
431 SDN SELOTINATAH 1
432 SDN SELOTINATAH 2
433 SDN SELOTINATAH 4
434 SDN NGARIBOYO 4
435 SDN PENDEM
436 SDN BANYUDONO 1
437 SDN BANYUDONO 2
438 SDN BANJARPANJANG 1
439 SDN BANJARPANJANG 2
440 SDN NGARIBOYO 3
441 SDN NGARIBOYO 1
442 SDN BALEGONDO 2
443 SDN MOJOPURNO 2
444 SDN MOJOPURNO 1
445 SDN BANJAREJO 1
446 SDN BANJAREJO 2
447 SDN BANJAREJO 3
448 SDN NGUNTORONADI 1
449 SDN NGUNTORONADI 2
450 SDN SIMBATAN 1
451 SDN SIMBATAN 2
452 SDN SIMBATAN 3
453 SDN PETUNGREJO
454 SDN DRIYOREJO 1
455 SDN DRIYOREJO 2
456 SDN KENONGOMULYO 1
457 SDN KENONGOMULYO 2
458 SDN GORANGGARENG
459 SDN SEMEN
460 SDN PURWOREJO 1
461 SDN PURWOREJO 2
462 SDN SUKOWIDI 1
463 SDN SUKOWIDI 2
464 SDN KALANG 1
465 SDN KALANG 2
466 SDN SAMBIROBYONG
467 SDN CAMPURSARI
468 SDN WIDOROKANDANG 1
469 SDN WIDOROKANDANG 2
470 SDN SUMBERSAWIT 1
471 SDN SUMBERSAWIT 2
472 SDN SUMBERSAWIT 3
473 SDN SIDOKERTO 1
474 SDN SIDOKERTO 2
475 SDN SIDOREJO
476 SDN DURENAN 1
477 SDN DURENAN 2
478 SDN GETASANYAR 1
479 SDN GETASANYAR 2
480 SDN GETASANYAR 3
481 SDN SIDOMULYO 1
482 SDN SIDOMULYO 2
483 SDN SIDOMULYO 3

III. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), TERDIRI DARI :

1. SMP NEGERI 1 MAGETAN
2. SMP NEGERI 1 NGARIBOYO
3. SMP NEGERI 2 NGARIBOYO
4. SMP NEGERI 1 SUKOMORO
5. SMP NEGERI 2 SUKOMORO
6. SMP NEGERI 4 MAGETAN
7. SMP NEGERI 2 MAGETAN
8. SMP NEGERI 3 MAGETAN
9. SMP NEGERI 1 PANEKAN
10. SMP NEGERI 1 SIDOREJO
11. SMP NEGERI 2 PANEKAN
12. SMP NEGERI 1 PLAOSAN
13. SMP NEGERI 2 PLAOSAN
14. SMP NEGERI 3 PLAOSAN
15. SMP NEGERI 2 SIDOREJO
16. SMP NEGERI 2 PARANG
17. SMP NEGERI 1 PARANG
18. SMP NEGERI 3 PARANG
19. SMP NEGERI 1 LEMBEYAN
20. SMP NEGERI 2 LEMBEYAN
21. SMP NEGERI 1 KAWEDANAN
22. SMP NEGERI 2 KAWEDANAN
23. SMP NEGERI 3 KAWEDANAN
24. SMP NEGERI 1 BENDO
25. SMP NEGERI 2 BENDO
26. SMP NEGERI 1 NGUNTORONADI
27. SMP NEGERI 1 TAKERAN
28. SMP NEGERI 3 MAOSPATI
29. SMP NEGERI 1 MAOSPATI
30. SMP NEGERI 2 MAOSPATI
31. SMP NEGERI 1 KARANGREJO
32. SMP NEGERI 2 KARANGREJO
33. SMP NEGERI 1 KARAS
34. SMP NEGERI 2 BARAT
35. SMP NEGERI 1 KARTOHARJO
36. SMP NEGERI 1 BARAT
37. SMP NEGERI 1 PONCOL
38. SMP NEGERI SATU ATAP PONCOL
39. SMP NEGERI 2 PONCOL

BUPATI MAGETAN

ttd

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 42 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002